

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Agra Raihan Iman Hidayat Roy
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing :

1. Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.
2. Yaries Mahardika Putro S.H., LL.M.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan urgensi yuridis terkait proses pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif konstitusionalisme, pemakzulan merupakan instrumen hukum untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat agar penyelenggaraan kekuasaan eksekutif tetap berada dalam koridor negara hukum. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan antara proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan proses konstitusional di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mekanisme pemakzulan yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemakzulan di Indonesia merupakan perpaduan antara mekanisme hukum dan mekanisme konstitusional yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), MK, dan MPR. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga perwakilan daerah yang tidak berasal dari partai politik tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan pemakzulan dan hanya terlibat dalam pengambilan keputusan di MPR. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait sejauh mana mekanisme pemakzulan telah mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat secara proporsional. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penegasan pengaturan hukum agar mekanisme pemakzulan memberikan kepastian hukum, menjunjung tinggi prinsip negara hukum, serta merefleksikan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan presidensial.

Kata Kunci: Pemakzulan, Kedaulatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

A JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPEACHMENT OF THE PRESIDENT AND/OR VICE PRESIDENT UNDER THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Agra Raihan Iman Hidayat Roy
Faculty of Law University of Surabaya

Contributor :

1. Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.
2. Yaries Mahardika Putro S.H., LL.M.

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal mechanism and juridical urgency of the impeachment process of the President and/or Vice President within the Indonesian constitutional system after the amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. From the perspective of constitutionalism, impeachment serves as a legal instrument to uphold the principle of popular sovereignty, ensuring that executive power remains exercised within the framework of the rule of law. The focus of this study examines the relationship between the judicial process conducted by the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi/MK) and the constitutional process carried out by the People's Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR), which may give rise to interpretative ambiguities. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the impeachment mechanism in Indonesia represents a combination of legal and constitutional procedures involving the House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR), MK, and MPR. In this framework, the Regional Representative Council (Dewan Perwakilan Daerah/DPD), as a representative institution not originating from political parties, does not possess the authority to propose impeachment and is limited to participation in decision-making within the MPR. This condition raises juridical concerns regarding the extent to which the impeachment mechanism adequately reflects the principle of popular sovereignty. Therefore, this research recommends the clarification and reinforcement of legal regulations governing impeachment to ensure legal certainty, uphold the rule of law, and properly reflect popular sovereignty within the presidential system of government.

Keywords: Impeachment, Popular Sovereignty, House of Representatives (DPR), Constitutional Court (MK), People's Consultative Assembly (MPR), Regional Representative Council (DPD).